

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan *sustainable development goals* (SDGs) dan merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kesejahteraan masyarakat Indonesia merupakan suatu wujud kehidupan yang diperjuangkan dalam pembukaan UUD 45. Kesejahteraan suatu keluarga bukan hanya semata-mata ditentukan oleh seberapa besarnya pendapatan keluarga, tetapi bagaimana cara mengelola keuangan keluarga itu agar tercukupkan dalam membiayai kebutuhan hidup dari hari ke hari, terutama ditengah tantangan ekonomi sosial yang selalu hadir dalam berbagai bentuk. Di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya, ada sebagian keluarga yang lebih mengutamakan aspek emosional dalam melakukan kegiatan dimana penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan mereka yang dapat dipandang atau bisa saja merupakan kendala dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengelola keuangan secara rasional sesuai dengan skala prioritas dipandang merupakan hambatan dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, padahal budaya menabung, merupakan indikasi dari skala prioritas dalam pengelolaan keuangan, serta menentukan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang yang perlu dilakukan oleh setiap keluarga. Penggunaan keuangan secara rasional dalam rangka menjamin kesejahteraan keluarga serta masyarakat dapat dipandang sejalan sesuai dengan pengertian *bounded rationality*.

Pengelolaan keuangan secara rasional merupakan strategi untuk dapat keluar dari garis kemiskinan yang masih ada di Indonesia, dalam konteks ekonomi, kemiskinan itu bersifat multidimensional, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin aset, organisasi sosial politik dan pengetahuan serta keterampilan; dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan

gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Arsyat, 2016).

Masalah kemiskinan dipicu oleh beberapa hal, diantaranya adalah mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal dan keterampilan. Selain itu, pada umumnya mereka tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha (Prayitno dan Santoso, 1996). Data keluarga prasejahtera di Jawa Barat pada tahun 2015 menunjukkan total keluarga prasejahtera sebesar 2.390.125 keluarga. Secara rinci data keluarga prasejahtera dapat dilihat pada di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Keluarga Berdasarkan Tahapan Keluarga Sejahtera**  
**di Jawa Barat, 2015**

	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kepala Keluarga</b>	<b>Pra Sejahtera</b>	<b>Keluarga Sejahtera</b>
<b>Kabupaten</b>				
1.	Bogor	1.260.840	188.393	361.277
2.	Sukabumi	715.593	235.329	252.971
3.	Cianjur	665.193	78.748	247.120
4.	Bandung	918.125	128.307	396.415
5.	Garut	715.685	175.691	252.021
6.	Tasikmalaya	571.229	115.390	181.439
7.	Ciamis	397.517	79.639	93.601
8.	Kuningan	342.338	40.907	81.610
9.	Cirebon	677.089	196.141	193.822
10.	Majalengka	398.100	73.449	94.638
11.	Sumedang	353.385	37.548	90.968
12.	Indramayu	605.017	176.495	167.637
13.	Subang	483.456	140.728	145.258
14.	Purwakarta	280.971	19.094	29.695
15.	Karawang	685.544	240.046	154.506
16.	Bekasi	885.347	237.415	198.934
17.	Bandung Barat	457.477	87.055	190.028
18.	Pangandaran	135.388	37.840	33.257
<b>Kota</b>				
1.	Bogor	23.400	1.080	6.478
2.	Sukabumi	84.784	2.642	15.982
3.	Bandung	295.509	36.891	84.853
4.	Cirebon	75.109	8.830	17.608

Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala Keluarga	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera
5. Bekasi	567.739	22.344	93.889
6. Depok	431.334	6.422	65.460
7. Cimahi	138.725	4.084	41.353
8. Tasikmalaya	184.029	3.864	71.923
9. Banjar	55.255	15.753	7.477
Jawa Barat	12.404.178	2.390.125	3.570.220

Sumber: <https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/13/298/jumlah-keluarga-berdasarkan-tahapan-keluarga-sejahtera-di-jawa-barat-2015.html>

Berdasarkan data yang diperoleh dan tersaji pada tabel 1.1 mengenai tingkat kesejahteraan keluarga di Jawa Barat, menunjukkan bahwa masyarakat prasejahtera di Jawa Barat sebanyak 2.390.125 keluarga, walaupun jumlahnya lebih kecil daripada Keluarga Sejahtera sebanyak 3.570.220, kondisi tersebut akan berdampak pada kegiatan ekonomi maupun sosial di Jawa Barat, sehingga penelitian ini fokus pada kelompok masyarakat di Jawa Barat. Berdasarkan data dari 18 Kabupaten dan 9 Kota, penelitian ini fokus di 9 kota yang ada di wilayah Jawa Barat. Pemilihan lokasi tersebut diharapkan akan memberikan gambaran yang dapat membandingkan perilaku keuangan di wilayah yang memiliki tingkat kesejahteraan keluarga yang berbeda.

Kelompok rumah tangga yang ada di wilayah Jawa Barat memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda. Masih banyak masyarakat yang tergolong miskin. Adapun indikator untuk menetapkan ukuran kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan penetapan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan masyarakat (keluarga) ditinjau dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan kebutuhan dasar makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk yang terindikasi miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Menurut BPS, terdapat tiga konsep mengenai indikator kemiskinan, yaitu: a). Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin, b). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari, c). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan

minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

**Tabel 1.2**  
**Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat**  
**(Rupiah/kapita/bulan), 2015-2017**

	<b>Kabupaten/Kota Regency/City</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Kabupaten/Regency</b>				
1	Bogor	290,874	317,430	337,550
2	Sukabumi	260,068	270,055	284,603
3	Cianjur	287,939	304,255	320,390
4	Bandung	275,562	297,483	310,569
5	Garut	241,068	256,770	267,252
6	Tasikmalaya	255,540	274,470	284,462
7	Ciamis	296,647	319,150	334,038
8	Kuningan	276,154	289,901	302,061
9	Cirebon	327,032	333,758	346,240
10	Majalengka	379,354	393,071	409,559
11	Sumedang	281,649	295,009	307,394
12	Indramayu	379,088	397,196	413,857
13	Subang	295,174	303,583	316,317
14	Purwakarta	296,477	312,499	325,607
15	Karawang	363,105	386,282	408,579
16	Bekasi	394,513	416,058	434,112
17	Bandung Barat <sup>*)</sup>	275,327	294,823	309,304
18	Pangandaran	303,646	327,399	342,672
<b>Kota/City</b>				
1	Kota Bogor	392,405	416,779	450,078
2	Kota Sukabumi	421,908	441,948	470,133
3	Kota Bandung	376,311	400,541	420,579
4	Kota Cirebon	358,654	373,866	392,725
5	Kota Bekasi	497,343	521,813	44,534
6	Kota Depok	496,747	522,934	556,470
7	Kota Cimahi	386,513	411,665	433,759
8	Kota Tasikmalaya	367,673	397,215	416,837
9	Kota Banjar	271,017	289,369	305,603
<b>Jawa Barat</b>		<b>306,876</b>	<b>324,992</b>	<b>344,427</b>

Sumber: <https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/13/298/jumlah-keluarga-berdasarkan-tahapan-keluarga-sejahtera-di-jawa-barat-2015.html>

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun 2015-2016 sebesar 5,94%, dari tahun 2016-2017 mengalami peningkatan yang sama yaitu sebesar 5,98%. Berbasis pada data tersebut terlihat bahwa adanya suatu pergeseran dari masyarakat yang tergolong prasejahtera menjadi masyarakat miskin. Kondisi tersebut bisa saja disebabkan oleh perilaku keuangan yang tidak ideal mengakibatkan sulitnya keluarga prasejahtera menjadi keluarga sejahtera, akan tetapi dapat menyebabkan keluarga prasejahtera menjadi keluarga miskin yang merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan atau batas kemiskinan. Dampak dari keadaan itu secara nasional akan menghambat terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang menghambat pembentukan negara yang kuat secara ekonomi dalam upaya untuk tetap survive dalam menghadapi persaingan ekonomi politik dan dalam melawan ancaman yang latent di dunia.

Konsep keluarga sejahtera menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1992 adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. Mencermati data dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah keluarga sejahtera sebanyak 3.570.220 untuk Provinsi Jawa Barat.

Jumlah keluarga sejahtera dalam suatu daerah memberikan dampak positif bagi perekonomian, karena kekuatan pembangunan ekonomi akan optimal apabila penduduk dapat berpartisipasi penuh dalam membangun suatu daerah melalui kemampuan setiap masyarakat yang dapat berperan serta dalam menentukan arah pembangunan dalam masyarakat, karena setiap orang mampu mengembangkan potensi dirinya. Pekerja yang telah berkeluarga juga merupakan aset atau sumber daya manusia yang produktif dalam pembangunan baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun negara. Harkat dan martabat ibu rumah tangga mengalami peningkatan yang terus menerus, dimana adanya perubahan ibu rumah tangga yang turut membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hakekat pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencerminkan kualitas

hidup dari suatu keluarga, dimana keluarga yang memiliki kualitas hidup yang lebih baik umumnya memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik juga (Rosni, 2017).

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, keputusan terkait dengan manajemen keuangan (misalnya dalam keluarga) dirasakan sangat penting, mengingat saat ini pertumbuhan konsumsi masyarakat yang terus meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Tingkat kesejahteraan menjadi tujuan seseorang dalam bekerja, banyak pendapat mengatakan semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang maka akan semakin sejahtera orang tersebut. Sepertinya pandangan tersebut saat ini tidak begitu relevan lagi. Tingkat pendapatan yang tinggi tanpa diiringi dengan pengelolaan yang baik maka tidak akan mendatangkan kesejahteraan bagi seseorang (Putra, Handayani dan Pambudi, 2013). Hal itu menandakan bahwa setiap masyarakat dari berbagai kalangan perlu memahami dan mengetahui perihal perilaku keuangan.

Keputusan pengelolaan keuangan di masyarakat ataupun daerah secara mikro akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang tergolong dalam keluarga sejahtera dan prasejahtera yang tidak hanya diukur dari pendapatannya, akan tetapi juga dari pengeluarannya. Sehingga melakukan keputusan keuangan yang berorientasi jangka panjang akan membentuk keluarga yang sejahtera dan mampu menghadapi bila terjadi krisis keuangan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *family financial behavior will have an impact on the level of welfare* (Farmer & Tiefenthaler, 1997), hal tersebut dikarenakan adanya faktor pengeluaran, pendapatan dan cadangan keuangan yang baik.

Keputusan keuangan seseorang tidak hanya didasari oleh aspek rasional, akan tetapi juga aspek emosional ataupun aspek sosial. Misalnya, dorongan seseorang untuk membeli barang yang tidak memiliki manfaat primer dalam kehidupan, justru barang yang menjadi keinginan atau menyesuaikan dengan gaya hidup modern, seringkali menjadi alasan seseorang untuk melakukan perilaku keuangan yang berdasarkan pertimbangan emosional. Hal itu menandakan bahwa adanya keterkaitan antara psikologi dan sosio-ekonomi dalam melakukan tindakan yang berkenaan dengan keuangan (Ramadhaniyati & Hayati, 2014).

Permasalahan yang terjadi dari adanya tindakan seseorang yang melakukan kegiatan yang berkenaan dengan keuangan atas dasar emosional yaitu terjadi pada keluarga prasejahtera, karena mereka memiliki keterbatasan ekonomi untuk

melakukan tindakan yang berkenaan dengan keuangan. Permasalahan yang sering terjadi yaitu seringkali banyaknya pinjaman yang tidak berimbang dengan penghasilan, sehingga keluarga prasejahtera sangat sulit untuk naik menjadi keluarga yang sejahtera. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keluarga prasejahtera tidak memiliki pengetahuan mengenai manajemen keuangan (Hermanus, Evelyn, & Patricia, 2013) yang berimbas pada perilaku keuangan yang tidak baik.

Memahami teori rasionalitas yang fleksibel, penting untuk menyatakan beberapa proposisi dalam teori yaitu: 1. Pengambilan keputusan rasional adalah proses pengambilan keputusan yang dioptimalkan berdasarkan logika dan pemikiran ilmiah berdasarkan informasi. Masalah keputusan yang dioptimalkan menjadi perlu mengingat perpindahan pengambilan keputusan ke arah penggunaan secara praktik, 2. Proses rasionalitas tidak dapat dibagi. Dengan kata lain, tidak boleh setengah rasional dan setengah irasional. Jika setengah rasional dan setengah irasional, menjadi tidak rasional. Konsep ketidakterpisahan rasionalitas dan dampaknya pada banyak segi kehidupan adalah konsep kuat yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. 3. Prinsip rasionalitas terbatas tidak memotong teori rasionalitas tetapi hanya merinci batas-batas di mana prinsip rasionalitas diterapkan (Marwala, 2013).

Dalam keilmuan manajemen keuangan terdapat 11 variabel yang berkaitan dengan perilaku keuangan, bias kognitif yang terdiri atas *overconfidence bias*, *representativeness bias*, *availability bias*, *confirmation bias*, *hindsight bias*, dan *illusion of control bias*, dan bias emosional yang terdiri atas *loss aversion bias*, *endowment bias*, *self-control bias*, *regret aversion bias*, dan *status quo bias*, terhadap pengambilan keputusan keuangan (Pompian, 2011).

Penelitian terdahulu menemukan bahwa ada beberapa bias yang mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan (Tversky & Kahneman, 1979), seperti *overconfidence bias*, *representativeness bias* dan *availability bias*. Setelah itu, banyak bias yang ditemukan seperti bias kognitif, bias representatif, bias kepercayaan berlebihan, dan bias penghindaran kerugian (Koichi & Toshihiko, 2013). Seseorang membuat keputusan keuangan di bawah ketidakpastian dianalisis kembali dengan efek gabungan dari beberapa bias lainnya, seperti *endowment bias* dan *regret aversion bias* (Armstrong, 1984). Sikap terhadap keuntungan dan kerugian karena perbedaan statis dan emosional memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengambilan keputusan keuangan itulah sebabnya mereka berperilaku tidak rasional (Zaidi & Tauni, 2012),

emosi dan jiwa adalah faktor utama. Kemungkinan efek penghindaran kerugian menyarankan, secara lebih umum, bahwa perlakuan tanggapan terhadap perubahan variabel ekonomi harus secara rutin memisahkan kasus perubahan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan (Kahneman, Knetsch & Thaler, 1991). Kahneman, Knetsch dan Thaler (1991) menyarankan bahwa seseorang yang bias menghindari kerugian lebih irasional dalam membuat keputusan investasi. Jadi literatur kami membedakan dua jenis investor, yang pertama adalah atas nama bias penghindaran kerugian, tidak menanggung risiko yang tidak perlu dan menyelamatkan modal dari kerugian atau efek positif sementara investor pemikiran kedua tidak berpengaruh dari bias tersebut dan berpengaruh negatif pada investasi pengambilan keputusan.

Studi empiris tentang pola pengambilan keputusan ketika adanya status quo bias dalam keputusan konsumen (Hartmann, Doane dan Woo, 1991) atau dalam keputusan investasi (Patel, Zeckhauser dan Hendricks, 1991; Agnew, Balduzzi dan Sundén, 2003; Kempf dan Ruenzi, 2006). Penelitian Kempf dan Ruenzi (2006) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset dana investasi. Menurutnya di samping karakteristik dana yang relevan (seperti kinerja, volatilitas, usia, ukuran, biaya atau tingkat perputaran), aliran dana di masa lalu memainkan peran yang signifikan secara statistik dan ekonomi, hal ini diartikan sebagai bias status quo.

Furche dan Johnston (2006) meneliti *bias endowment* dalam aktivitas perdagangan di Bursa Efek Australia dan menegaskan temuan bahwa investor canggih kurang terpengaruh oleh efek endowment daripada perdagangan klien swasta yang terjadi melalui pialang ritel. Dengan kata lain, Furche dan Johnston mendukung Coursey et al. kesimpulan bahwa pengetahuan ekonomi (yaitu pembelajaran) relevan dengan ukuran kesenjangan WTA-WTP.

Knez, Smith dan Williams (1985) dan Knez dan Smith (1987) berpendapat bahwa penjual tidak hanya melebih-lebihkan nilai sebenarnya dari aset mereka, tetapi sering diberi penghargaan atas pernyataan yang berlebihan. Pembeli juga sering dihargai karena mengecilkan harga penawaran aset yang ingin mereka beli. Para penulis menunjukkan bahwa efek *endowment* mungkin hanya hasil dari kebiasaan tawar-menawar yang baik. Penjual lebih cenderung menjual dengan harga lebih tinggi jika mereka meminta harga tinggi (relatif terhadap nilai sebenarnya dari aset) dan



pembeli lebih cenderung membayar harga yang lebih rendah jika mereka menawarkan harga rendah. Noles (2012) mempelajari anak-anak prasekolah dan menyimpulkan bahwa pada usia muda (antara 2 dan 4,4 tahun), bukti efek *endowment* tidak hanya ada, tetapi juga efek *endowment* yang hampir instan. Dengan demikian, anak-anak di usia yang sangat dini memberikan nilai yang lebih tinggi pada harta benda mereka sendiri relatif terhadap nilai sebenarnya dari barang tersebut. Chatterjee, Irmak, dan Rose (2013) menguatkan efek *endowment* instan.

Beberapa studi menunjukkan bahwa terlalu percaya diri merupakan alasan penting untuk volatilitas harga yang berlebihan. Benos (1998) mengusulkan model di mana eksploitasi agresif informasi menguntungkan pedagang yang terlalu percaya diri, bersama-sama dengan strategi perdagangan konservatif pedagang rasional, melakukan harga untuk sangat bervariasi dalam satu atau arah lain. Dalam model mereka, Daniel et al. (1998) menunjukkan bahwa investor yang terlalu percaya diri meningkatkan volatilitas harga pada saat penerimaan sinyal perusahaan.

Lakonishok, Shleifer, dan Vishny (1994), menemukan bahwa cara berpikir *representativeness bias* menyebabkan investor keliru karena menyangka perusahaan bagus adalah investasi bagus (*good company is good investment*). Selain itu, dapat juga menyebabkan perilaku investor melakukan ekstrapolasi return masa lalu terhadap return di masa mendatang. Temuan sebelumnya juga didukung oleh Dhar dan Kumar (2001) dalam Baker dan Nofsinger (2002) bahwa investor dalam membuat keputusan transaksi hanya pada saham-saham yang menunjukkan tren meningkat pada masa lalu. Dengan demikian, perilaku ini mencerminkan bahwa investor akan menjadi optimis akan masa depan jika trend harga menunjukkan kenaikan dan menjadi pesimis jika trend harga menunjukkan penurunan.

Temuan lain, Kaestner (2005), Franses (2007), serta Marsden, Veeraraghavan dan Ye (2008) bahwa *representativeness bias* dapat menyebabkan perilaku *overreaction* yang terkristalkan dari harga saham. Selain itu ditemukan juga bahwa upaya meramalkan harga saham seperti melakukan penjudian karena mendasarkan peramalan pada kesuksesan yang baru dialami sebagai dasar pengambilan keputusan dengan harapan akan terulang lagi dan bertendensi memperoleh bias return. Sementara itu, Chen, Kim dan Nofsinger (2007) menemukan bukti empiris bahwa faktor-faktor demografi seperti investor setengah baya, investor yang aktif, investor berpendapatan tinggi, pengalaman investor, serta investor yang bertempat tinggal di

kota kosmopolitan menunjukkan kecenderungan mengalami *representativeness bias*, yakni penetapan harga saham berdasarkan tren masa lalu, walaupun pada kenyataannya belum tentu terjadi seperti yang diprediksikan.

Dampak dari Bias Ketersediaan yang merujuk pada situasi ketika investor membuat keputusan sesuai dengan informasi yang tersedia atau Probabilitas peristiwa dengan informasi yang tersedia dan ketika contoh relevansi muncul di benak saat pengambilan keputusan (Tversky & Kahneman, 1973) dan bias penghindaran kerugian menjelaskan perilaku bias dengan pengaruh disposisi (teori prospek), risiko dan paradoks pengembalian (Fiegenbaum & Thomas, 1988). Rioritas pengambilan risiko dan penghindaran risiko bervariasi dari sekuritas ke sekuritas. Ini menjelaskan perilaku investor; mereka menjadi risk averse ketika prior return berada di atas level target dan risk seeker jika terjadi kerugian sebelumnya (Jegers, 1991). Teori ini berlaku dalam perspektif yang berbeda ketika terdapat begitu banyak alternatif karena pengambil keputusan tidak konstan dalam preferensi mereka. Salah satu sumber ketersediaan informasi yaitu media iklan yang membuat investor tidak rasional dapat dengan cepat berreaksi (Zhu, 2002). Orang menilai peristiwa yang sama akan masuk ke dalam kategori tertentu karena kemiripan dengan kejadian sebelumnya, itulah sebabnya pengambilan Risiko dan penghindaran risiko investor sangat terkait dengan Kerugian dan keuntungan sebelumnya, dapat menyebabkan kesalahan penilaian risiko (Mcnamara & Bromiley, 1997), lebih lanjut kognitif dan kelemahan emosional memainkan peran penting dan efek dari bias ketersediaan juga dijelaskan oleh (Baker & Nofsinger, 2002; Sewell, 2007).

Camerer dkk. (1989) menggunakan metode serupa untuk mengukur hindsight bias tinjau balik. Camerer dkk. (1989) menunjukkan bahwa pasar mengurangi tetapi tidak menghilangkan hindsight bias. Temuan ini dengan menawarkan hasil baru tentang konsekuensi bias untuk pemrosesan informasi dan kinerja keuangan. Hubungan antara hindsight bias dan kinerja didasarkan pada data yang dikumpulkan di lapangan, dari bankir investasi yang dibayar tinggi dan berpengalaman. Ini sejalan dengan beberapa eksperimen lapangan baru-baru ini tentang keputusan keuangan dan psikologi. secara empiris menghubungkan konstruksi psikologis dengan variabel ekonomi (Camerer 1987, Fenton O'Creevy et al. 2003, Biais et al. 2005, Glaser dan Weber 2007).

Konsekuensi merugikan dari hindsight bias. Mangelsdorff dan Weber (1998) dan Madarasz (2008) menunjukkan bahwa dalam hubungan agen utama, bias tinjau balik akan mencegah prinsipal mengevaluasi kinerja agen dengan benar. Memang, prinsipal bias gagal mengingat apa yang diketahui ketika keputusan agen diambil, yang sejalan dengan temuan Baron dan Hershey (1988). Hölzl dkk. (2002) menemukan bahwa, ketika ditanya pertanyaan tentang ekonomi sebelum dan setelah pengenalan euro, pendukung euro menunjukkan bias tinjau belakang yang lebih kuat untuk perkembangan positif, sedangkan lawan menunjukkan bias yang lebih kuat untuk perkembangan negatif. Fischho (1975) menemukan peserta tidak menyadari bahwa informasi hasil mempengaruhi apa yang mereka pikir akan mereka ketahui di masa depan. Fischho (1977) beralasan bahwa mekanisme pemrosesan mendorong efek tinjau balik: individu terutama memikirkan faktor pra-hasil yang konsisten dengan hasil yang diberikan, dan proses itu meningkatkan keniscayaan yang dirasakan.

Creevy, Nicholson, Soane, & Willman (2003) meneliti dampak keyakinan kontrol ilusi terhadap kinerja pedagang di instrumen keuangan. Mereka berpendapat bahwa kecenderungan ilusi bias kontrol akan terkait dengan kinerja pedagang. Studi tersebut mengungkapkan bahwa trader dengan level ilusi kontrol yang lebih tinggi memiliki performa yang lebih rendah dibandingkan dengan trader dengan level yang lebih rendah. Lebih jauh, ilusi kendali bertumpu pada kombinasi faktor situasional dan kecenderungan individu, yang berakar pada kepribadian dan pembelajaran. Di pasar keuangan, mungkin ada beberapa trader yang dengan sengaja menyesatkan pelaku pasar lainnya dengan menciptakan ilusi untuk mendapatkan keuntungan. (Hamadi, Rengifo & Salzman 2005). Konsep baru ini disebut dengan keuangan ilusi, menunjukkan bagaimana ilusi dapat dimasukkan (langsung atau tidak langsung, ilusi memanfaatkan dari orang-orang percaya yang dapat berupa pedagang informasi atau pedagang kebisingan.

Ilusi kendali menyebabkan penilaian risiko yang tidak akurat (Langer, 1975; Schwenk, 1984). Pada dasarnya, semakin tinggi persepsi pengendalian, semakin tinggi kemungkinan meremehkan risiko (Schwenk, 1986). Dengan kata lain, kesalahpahaman positif manajer tentang kontrol akan menyebabkan perkiraan rasio keberhasilan tugas yang terlalu tinggi. Illusion of control melawan kecenderungan alami individu untuk meremehkan informasi positif dan melebih-lebihkan informasi

negatif, yang biasanya menghasilkan perkiraan yang dibatasi kemungkinan untuk mengurangi kemungkinan overestimasi (Langer, 1975; Schweitzer dan Cachon, 2000). Menurut Sutcliffe dan Huber (1998), kemampuan pengendalian adalah dimensi yang paling terkait dengan afiliasi perusahaan, yang menegaskan bahwa persepsi pengendalian perusahaan terkait erat dengan karakteristiknya.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini fokus melakukan penelitian dalam bias kognitif yang terdiri atas *overconfidence bias*, *representativeness bias*, *availability bias*, *confirmation bias*, *hindsight bias*, dan *illusion of control bias*, dan bias emosional yang terdiri atas *loss aversion bias*, *endowment bias*, *self-control bias*, *regret aversion bias*, dan *status quo bias*, terhadap keputusan keuangan pada kelompok rumah tangga. Alasan kenapa penelitian ini di keputusan keuangan rumah tangga karena dalam beberapa dekade terakhir, penelitian tentang perubahan perilaku keuangan rumah tangga telah menjadi populer karena perubahan situasi ekonomi makro. Kolasa & Liberda (2015) memverifikasi hubungan statistik antara pendapatan, demografi keluarga, dan ukuran tempat tinggal dengan jumlah tabungan rumah tangga masyarakat Polandia terhadap keputusan keuangan. Utzig (2016) mengidentifikasi dan mengevaluasi perubahan nilai dan struktur aset keuangan rumah tangga di Polandia pada tahun 2003-2014, juga dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan ekonomi. Hronová & Hindls (2013) membandingkan perilaku rumah tangga Ceko di akhir 90-an dengan periode 2009 - 2012, menghitung kembali respon rumah tangga terhadap krisis perekonomian di tahun 2008. Zhuk (2015) telah menyelidiki indikator makroekonomi paling signifikan yang mempengaruhi keputusan keuangan masyarakat ukrania.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh bias terhadap perilaku keputusan rumah tangga masyarakat di Jawa Barat. Dengan melihat adanya realitas masyarakat sejahtera dan prasejahtera di Jawa Barat, maka dalam penelitian ini memasukkan variabel moderasi yaitu kelompok rumah tangga yang terdiri dari kelompok rumah tangga sejahtera dan kelompok rumah tangga prasejahtera. Dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian dengan Judul” Studi Bias Pada Kelompok Masyarakat Rumah Tangga di Jawa Barat”.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka peneliti membuat beberapa rumusan masalah penelitian agar terarah serta sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah disinggung dalam latar belakang, adapun rumusan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

“Bagaimana pengaruh *overconfidence bias*, *representativeness bias*, *availability bias*, *confirmation bias*, *hindsight bias*, *illusion of control bias*, *loss aversion bias*, *endowment bias*, *self-control bias*, *regret aversion bias*, *status quo bias* terhadap pengambilan keputusan keuangan yang dimoderasi oleh kelompok rumah tangga di masyarakat Jawa Barat.”.

### 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yang dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, diantaranya:

#### a. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *bias kognitif yang terdiri atas overconfidence bias, representativeness bias, availability bias, confirmation bias, hindsight bias, dan illusion of control bias, dan bias emosional yang terdiri atas loss aversion bias, endowment bias, self-control bias, regret aversion bias, dan status quo bias*, terhadap pengambilan keputusan keuangan masyarakat di Jawa Barat yang dimoderasi oleh kelompok rumah tangga.

#### b. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, penelitian ini pula memiliki tujuan khusus yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *overconfidence bias, representativeness bias, availability bias, confirmation bias, hindsight bias, illusion of control bias, loss aversion bias, endowment bias, self-control bias, regret aversion bias, status quo bias* terhadap keputusan keuangan pada masyarakat Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *overconfidence bias, representativeness bias, availability bias, confirmation bias, hindsight bias, illusion of control bias, loss aversion bias, endowment bias, self-control bias,*

*regret aversion bias, status quo bias* terhadap keputusan keuangan yang dimoderasi oleh kelompok rumah tangga pada masyarakat Jawa Barat.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat terhadap perkembangan ilmu pendidikan ekonomi, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

##### **a. Secara Teoritis**

1. Memberikan sumbangsih terhadap khazanah ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan keuangan prilaku.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan perguruan tinggi mengenai pentingnya meningkatkan pengetahuan literasi keuangan, yang berguna dalam pengambilan keputusan keuangan.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindakan dan perilaku yang dapat menghemat pengeluaran dan meningkatkan taraf ekonomi.

##### **b. Secara praktis**

###### **1. Masyarakat**

- a. Memberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat rumah tangga di Jawa Barat.
- b. Memberikan dasar pengambilan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Jawa Barat dalam keputusan keuangan.

###### **2. Pemerintah**

- a. Memberikan gambaran kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi bagi masyarakat Jawa Barat.
- b. Menjadi referensi akademis bagi pemerintah dalam mendorong masyarakat menjadi lebih produktif.
- c. Menjadi rujukan bagi pemerintah dalam memahami karakter masyarakat, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil efektif dalam menyelesaikan permasalahan.
- d. Memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi yang berbasis keilmuan untuk menyelesaikan masalah perekonomian di masyarakat khususnya masyarakat Jawa Barat umumnya masyarakat Indonesia.

3. Perguruan Tinggi
  - a. Menjadi kajian akademis yang dapat didiskusikan dalam lingkungan akademisi yang terkait dengan perilaku keuangan.
  - b. Menegaskan perguruan tinggi sebagai *centre of knowledge* dalam pengkajian keilmuan keuangan perilaku.
  - c. Memberikan dampak strategis bagi perguruan tinggi yang memiliki manfaat untuk membenahi taraf ekonomi masyarakat prasejahtera.